



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SANRINA RIA SIMANJUNTAK
1915100487

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

NAMA : SANRINA RIA SIMANJUNTAK
N.P.M : 1915100487
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 18 Januari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dito Aditia Dama Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Muhammad Ihsan Rangkuti, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sanrina Ria Simanjuntak
N.P.M : 1915100487
Fakultas/Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Laporan
Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2024
Yang Menyatakan



Sanrina Ria Simanjuntak
NPM: 1915100487

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sanrina Ria Simanjuntak
Tempat/Tanggal Lahir : Hutaginjang 15 Januari 2001
N.P.M : 1915100487
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Hutaginjang

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Januari 2024
Yang Menyatakan



Sanrina Ria Simanjuntak
NPM: 1915100487

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Analisis dan tantangan Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI untuk menjadi good governance. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berbasis AkruaI di Pemerintah Kota Medan sudah dalam kategori cukupbaik dan efektif. Hal ini ditandai dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Tantangan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terdiri dari sistem akuntansi dan *information technolog (IT) based system*, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi dalam perubahan dan lingkungan/masyarakat. Kelima tantangan tersebut dapat diatasi berbagai kendalanya oleh Pemerintah Kota Medan dengan efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kota Medan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk menunjang dan mendukung implementasi SAP berbasis akruaI PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, Tantangan Pemerintah dan Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study is entitled "Analysis of the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards to Financial Statements in the Medan City Government". The purpose of this study was to determine the analysis and challenges of the Medan City Government in implementing Accrual-Based Government Accounting Standards to become good governance. In this study the analysis method used was descriptive qualitative. In collecting data using observation, interview and documentation techniques. The results showed that the Application of Accrual-Based SAP in the Medan City Government was already in the category of good enough and effective. This is indicated by the preparation of the Medan City Government's financial statements in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. The challenges faced by the government in implementing Accrual-Based Government Accounting Standards consist of accounting systems and information technology (IT) based systems, commitment from the leadership, availability of competent human resources, resistance to change and the environment/society. The five challenges can be overcome various obstacles by the Medan City Government effectively and efficiently. Currently the Medan City Government uses the SIMDA (Regional Management Information System) application to support and support the implementation of accrual-based SAP PP Number 71 of 2010.

Keywords: Accrual-Based Government Accounting Standards, Government Challenges and Financial Statements.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi S1 pada program studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih istimewa kepada kedua orangtua tercinta yang telah banyak berkorban selalu memberikan doa, nasihat, dukungan dan bantuan secara moril dan material yaitu Bapak Bernad Simanjuntak dan Ibu Normiani Ompusunggu. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., CiQaR., CIQnR., CIMMR Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Pembangun Panca Budi Medan.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst. S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Muhammad Ihsan Rangkuti,SE,Ak,MSi,CA,QIA selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Saudara-saudari tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat yaitu, Lamhot Simanjuntak, Miduk Simanjuntak, Lisna Simanjuntak, Julita Simanjuntak, Dewi Simanjuntak, Anto Simanjuntak, Tulus Simanjuntak, Lasmida Simanjuntak.
8. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi nantinya akan menghadapi masalah serta kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu,penulis mengharapkan bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Januari 2024

Penulis

Sanrina Ria Simanjuntak
1915100487

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.3.1 Batasan Masalah.....	4
1.3.2 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	7
2.1.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah.....	8
2.1.3 Pengertian Berbasis Akrua.....	9
2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua ...	9
2.1.5 Implementasi SAP Berbasis Akrua.....	13
2.2 Laporan Keuangan	20
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan	20
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan.....	24
2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan.....	27
2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan	28
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Konseptual	31
BAB III : METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Populasi dan Sampel	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.4.1 Jenis Data	35
3.4.2 Sumber Data	35

3.5 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	35
3.5.1 Defenisi Operasional	35
3.5.2 Variabel Penelitian	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.2 Dinas Pemerintahan Kota Medan.....	43
4.1.3 Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010.....	44
4.1.4 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No.01 Pemeintah Kota Medan.....	45
4.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Menurut PP No 71 Tahun 2010.....	52
4.1.6 Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010.....	56
4.1.7 Pembahasan.....	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72
BIODATA	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Basis Kas Menuju AkruaI Dan Basis AkruaI	17
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	34
Tabel 3.2 Defenisi Operasional	36
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kota Medan	46
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Medan Medan ...	47
Tabel 4.3 Neraca Pemerintahan Kota Medan 2021-2022	48
Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintahan Kota Medan	49
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintahan Kota Medan	50
Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintahan Kota Medan.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Logo Pemerintahan Kota Medan.....	42
Gambar 4.2 Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021-2022	46
Gambar 4.3 Grafik Lpsal Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021-2022	47
Gambar 4.4 Grafik Neraca Pemerintahan Kota Medan 2021-2022.....	48
Gambar 4.5 Grafik Laporan Operasional Kota Medan 2021-2022.....	50
Gambar 4.6 Grafik Laporan Arus Kas Kota Medan 2021-2022.....	51
Gambar 4.7 Grafik Laporan Perubahan Ekuitas Kota Medan 2021-2022.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Ketiga paket Undang-Undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah Undang-Undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*)

Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada sektor publik di Indonesia saat ini, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semakin dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah cara pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness*, dan *accountability*. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua unsur pokok dalam

mewujudkan *good government governance*. Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang disampaikan secara periodik. Akuntabel berarti bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat penyelenggara pemerintahan baik dalam membuat kebijakan maupun dalam mengatur dan membelanjakan keuangan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya, transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa didukung dengan akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP Berbasis AkruaI mulai tahun anggaran 2015. Tujuan utama penerapan SAP Berbasis AkruaI pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, peningkatan kualitas informasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat berbagai keputusan terhadap suatu entitas pemerintah daerah.

Pemerintahan menerbitkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) secara sah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 penyempurnaan dari Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005. Akuntansi berbasis akruaI adalah basis akuntansi dimana transaksi, ekonomi, serta peristiwa lainnya yang diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan disaat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Kemudian dalam peraturan ini, bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode waktu tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan berkaitan dengan laporan keuangan yaitu penyusunan laporan keuangan antara lain klasifikasi penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan keuangan lainnya pada jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak tepat. (<https://sumut.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-daerah>)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah laporan keuangan yaitu penyusunan laporan keuangan antara lain klasifikasi penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan keuangan lainnya pada jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak tepat.

1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada Pemerintahan Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. Adapun masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penerapan penelitian ini adalah Apakah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap laporan keuangan pada pemerintahan tepatnya pada Pemerintahan Dinas Kota Medan

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, meliputi :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan teori laporan keuangan yang berpacu pada standar akuntansi pemerintah yang telah dipelajari sehingga dapat diterapkan pada kejadian dilapangan.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan khususnya program Studi Akuntansi dalam pertambahan ilmu terkait Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi untuk memungkinkan peneliti selanjutnya mengambil topik-topik yang berkaitan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yogik Aninditya (2018) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung). Sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Sedangkan penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat.
2. Model Penelitian: Dalam penelitian terdahulu menggunakan model penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kuantitatif.
3. Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu melakukan penelitian tahun 2018. Sedangkan penelitian ini pada tahun 2022.
4. Lokasi Penelitian: Penelitian melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Sedangkan penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), suatu daerah diasumsikan sebagai kumpulan kontrak (*nexus of contact*) antara *principal* sebagai pihak yang memiliki sumber daya ekonomi dan *agent* sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya ekonomi tersebut. Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu *principal* yang disebut sebagai pihak pertama dan *agen* sebagai pihak kedua. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *prinsipal* serta memberi wewenang kepada *agen* membuat keputusan yang terbaik bagi *prinsipal*.

Menurut Ulum (2018) *Agency Theory* merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agen* dan pihak yang lain disebut *principal*. Tujuan dari menggunakan *agency theory* adalah mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara *prinsipal* dan *agen*. Apakah kontrak kerja sama telah berjalan dengan apa yang telah disepakati atau tidak. Meningkatkan kemampuan baik *prinsipal* ataupun *agen* dalam mengevaluasi kondisi dimana sebuah keputusan harus diambil. Prinsip utama didalam teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan agensi akan muncul ketika satu orang atau lebih (*pricipal*) mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang (*agen*) didalam pengambilan keputusan kepada *agen* tersebut. Masalah keagenan biasanya terjadi

ketika ada konflik kepentingan dalam hal kebijakan yang harus dilakukan di dalam sebuah hubungan keagenan. Keadaan ini dapat terjadi pada suatu daerah dengan kepemilikan saham manajerial.

2.1.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Standar akuntansi adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi adalah praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar (Abdurrahim, 2019). Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan (Jaladri & Riharjo, 2016).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 4 ayat 1 dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) / Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite standar akuntansi pemerintahan yang

independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintahan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

2.1.3 Pengertian Berbasis Akrual

Basis Akrual adalah dasar akuntansi mengenali dampak dari transaksi dan peristiwa lain selama transaksi dan peristiwa lain selama transaksi dari peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan apakah uang tunai atau setara kas yang diterima atau dibayarkan. Menurut Roring (2019) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas di terima atau dibayarkan. Sementara Supraja (2019) menyatakan Akuntansi Berbasis Akrual merupakan sistem akuntansi yang diakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomi dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 2010 Pasal 1 (8) yang dimaksud standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah mengidentifikasi pendapatan, pengeluaran, asset, hutang dan ekuitas pelaporan keuangan berbasis struktur dan mengidentifikasi pendapatan, pengeluaran dan pelaporan keuangan pelaksanaan berdasarkan yang ditetapkan oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) / anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, (Mentu & Sondakh, 2016). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas. Basis akrual untuk laporan operasional sebagai petunjuk bagi pendapatan yang diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan.

2. Nilai Historis (*Historial Cost*)

Nilai historis dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

3. Realisasi

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya dapat digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip ini sebagai informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang harus disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Jika substansi transaksi tidak konsisten dengan formalitasnya, maka harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

6. Konsistensi

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.5 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah dalam pemenuhan prinsip ketetapan waktu dan penyusunan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan peraturan perundang – undangan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, yang tertuang pada Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. “Implementasi diperkirakan akan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan daerah yang menjadi dasar terciptanya pemerintah yang transparan dan akuntabel menurut Nordiawana (2008) dalam (Darma, 2019)” karna standarisasi akuntansi pemerintahan didasarkan pada basis akrual.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan standar akuntansi (Darma, 2019), yaitu:

1. Standar memberikan panduan tentang informasi yang harus dimasukkan dalam laporan posisi kinerja keuangan dan kegiatan organisasi untuk semua pengguna informasi

2. Standar memberikan pedoman dan aturan perilaku bagi auditor wajib menguji dengan hati – hati dan menggunakan keterampilan dan integritas dalam memeriksa laporan organisasi dan menyatakan kewajaran.
3. Standar memberikan panduan tentang data yang akan tersedia dalam kaitannya dengan berbagai variabel yang harus dipertimbangkan di bidang perpajakan, perencanaan, regulasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
4. Standar menciptakan prinsip dan teori yang penting bagi semua pihak yang berkepentingan di bidang akuntansi. Berdasarkan teori yang diuraikan diatas, maka tujuan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah pemerintah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna dalam menilai kewajiban dan pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial.

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana terpenting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Widjajerso (2008) dalam Indah Sekar Asih (2018) menjelaskan alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.

3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu layanan publik dan menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dalam organisasi sektor publik basis akrual dimaksud untuk memberikan informasi tentang biaya operasional dan biaya pemulihan (cost recovery) atas penyediaan suatu layanan dan sejauh mana biaya layanan tersebut dapat ditutup pendapatan dalam periode tertentu.

Pemerintahan Pusat sebenarnya bisa saja beralih langsung dari basis kas ke basis akrual, namun karena adanya Peraturan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang bertujuan untuk mengatur Pemerintah Daerah dalam menggunakan basis kas modifikasian, yaitu kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Berdasarkan basis kas modifikasian, transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayarkan (basis Kas).

Kemudian pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk menyusun neraca, yaitu pencatatan transaksi dan kejadian pada periode berjalan, meskipun tidak terjadi penerimaan atau pembayaran. Selanjutnya metode kas modifikasi mengukur arus kas dari sumber keuangan lancar dengan mengukur kas dan kewajiban kas dengan mengakui transaksi yang telah terjadi pada akhir tahun yang diharapkan terjadi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada suatu periode waktu tertentu setelah akhir tahun.

Pada tahun 2010, dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Ada perubahan khusus dari SAP sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diwajibkan penggunaan akuntansi berbasis akrual (accual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Saat ini, pemerintah menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual yang merupakan basis transisi sampai dengan ditetapkan dengan paket UU bidang Keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholder. Manfaat lainnya adalah mampu memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran yang dibiayai melalui kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga dapat menjamin keseimbangan antargenerasi dan menentukan apakah generasi mendatang juga akan menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan dihasilkan hanya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan dan penerapan kebijakan sumber daya.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual

No	Uraian	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Kas
1	Jenis Laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas (LAK) d. Catatan Atas Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan Atas Laporan Keuangan e. Laporan Operasional (LO) f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2	Pengakuan Pendapatan	Pada saat kas diterima pada RKUN/D (kecuali satker BLU).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan pada LO saat hak timbul dan atau adanya aliran sumber daya ekonomi. b. Pendapatan pada LRA, saat kas diterima di RKUN/D
3	Pengukuran Belanja	Pada saat kas dikeluarkan dan RKUN/D (kecuali satker BLU)	<ul style="list-style-type: none"> a. Beban pada LO saat kewajiban timbul, konsumsi aset, atau penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa. b. Belanja pada LRA, saat pembayaran kas keluar dari RKIN/D.

Sumber : Simanjuntak (2010)

Menurut Muda dkk (2014) bahwa Sumber daya manusia, kedudukan, fasilitas dan infrastruktur, peraturan dan intensitas pelatihan administrasi dan akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Saat ditetapkannya SAP berbasis akrual maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mempunyai pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Diharapkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat menerapkan SAP berbasis akrual secara efektif, efisien, dan sesuai

sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang andal serta lengkap dalam laporan keuangan pemerintah.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan Indonesia menurut Simanjuntak (2010) sebagai berikut:

a. Sistem Akuntansi dan *information technolog (IT) based system*

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dilingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit.

b. Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Di undangkannya tiga paket Keuangan Negara serta Undang-Undang Pemerintah Daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislative untuk memperbaiki Sistem Keuangan Negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen atau Lembaga di Pemerintah Pusat dan Dinas/Unit Pemerintah Daerah sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu ke pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan.

c. Tersedianya SDM yang kompeten

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan SDM yang memiliki kompetensi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. Termasuk didalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

d. Resistensi terhadap perubahan

Perubahan yang terjadi dapat membuat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem lama akan sulit untuk mengikuti perubahan yang telah ditetapkan Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.

e. Lingkungan/Masyarakat

Kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- a. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
- d. PSAP Nomor 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi
- g. PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap

- h. PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam pengerjaan
- i. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- l. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Menurut Halim (2021) Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan biasanya dilaporkan atau disajikan dalam bentuk laporan neraca dan laporan laba rugi pada saat tertentu atau waktu tertentu, dan pada akhirnya digunakan sebagai alat informasi dalam mengambil kebijakan atau keputusan bagi para pemakai laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan, Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010 tentang penajian laporan keuangan PSAP 01 paragraf 9 “Laporan keuangan adalah laporan yang tekstur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum mempunyai peran prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memperdiksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasai yang berkelanjutan, serta seriko dan ketidakpastian yang terkait (Halkadri fitra, 2019:7)

Berdasarkan definisi laporan keuangan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara pihak intern (daerah) dengan pihak ekstern atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan data atau laporan dari hasil kegiatan operasional daerah yang disajikan, dimana laporan keuangan tersebut mencakup dua daftar utama, yaitu neraca dan laba-rugi serta satu daftar tambahan yaitu laba ditahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 Laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggran melengkapi berbagai informasi mengenai Realisasi Anggaran, belanja, transfer,dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. laporan tersebut menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Informasi ini nantinya bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi berbagai jenis pengambilan keputusan. Berdasarkan fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa laporan realisasi anggaran mempunyai sejumlah manfaat, antara lain:

- a. Menyajikan informasi mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi.

- b. Dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap keputusan yang akan dibuat.
- c. Dengan Adanya laporan realisasi dana tersebut memberikan rincian terhadap catatan kondisi keuangan secara menyeluruh.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Bagi pemerintah daerah LP-SAL tidak wajib disusun (bersifat opsional).

3. Neraca

Neraca menggambarkan bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Penggunaan Laporan Operasional (LO) untuk mengevaluasi

pendapatan-LO dan beban agar dapat menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Manfaat dari Laporan Arus Kas yaitu memberikan informasi mengenai sumber perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas merupakan alat yang digunakan untuk membayarkan hutang dan jasa yang sah. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tambahan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisiar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendadan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang lakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keungan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang di mamfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, penilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No.1 secara spesifik tujuan

pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan kepadanya.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan laporan keuangan adalah Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7. Menyediakan informasi mengenai berbagai entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
8. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas laporan yang berkaitan dengan sumber sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelapor apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 paragraf (25) Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 17 kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 18 tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun entitas Akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 “Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya”.

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki manfaat untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil. Informasi terkait dampak keuangan yang timbul dalam laporan itu sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai, meramalkan, dan membandingkan keuangan. Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah adalah kebutuhan atas laporan keuangan, laporan keuangan untuk transparansi, laporan keuangan untuk akuntabilitas, memberikan informasi dan mengevaluasi kinerja manajerial dan

organisasi. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa laporan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan, menilai kinerja manajemen suatu entitas pelaporan, dan juga menjadi salah satu bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu entitas pelaporan.

Menurut Wibowo (2019) Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuidasi dan solvabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dalam ketentuan lain yang diisyaratkan.
4. Memberikan informasi keuangan untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi keuangan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.2.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, terdapat empat karakteristik laporan keuangan, yaitu :

1. Relevan, informasi relevan dengan kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Dapat dipahami, kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakainya.

3. Keandalan, agar bermanfaat informasi memiliki kualitas keandalan dan bebas dari kesalahan; dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan.
4. Daya banding, informasi yang lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan dari perusahaan lain pada periode yang sama.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

N0	Nama/Tahun	Judul	Variabel	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Ursula Kewa Betan (2021)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Lembata	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Penyajian Laporan keuangan	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata telah sesuai dengan PSAP No. 12 dan perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya konsiten dalam menerapkan metode atau aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual, memperhatikan kevalidan data pada Laporan Operasional Beban, dan yang terakhir adalah ketepatan

					penyajian laporan keuangan berdasarkan periode pelaporan.
2	Umar Sako Felmi D. Lantowa(2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Gorontalo	Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyajian Laporan keuangan.	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penerapan SAP mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.
3	Marya Suryaningsih Maruf Hidayat (2020)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke)	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, Laporan keuangan.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Lia Aulia (2019)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berbasis AkruaI di Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik dan efektif. Hal ini ditandai dengan telah sesuainya penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

					tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
5	Yunita Kurnia Shanti (2018)	Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur)	Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71, Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan.	Deskriptif Kualitatif	Penerapan basis akrual pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 dampaknya yang ditimbulkan dengan adanya sistem akuntansi berbasis (SIMRAL) bahwa penyusunan laporan keuangan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Sumber: Data diolah penulis, 2023

2.4 Kerangka Konseptual

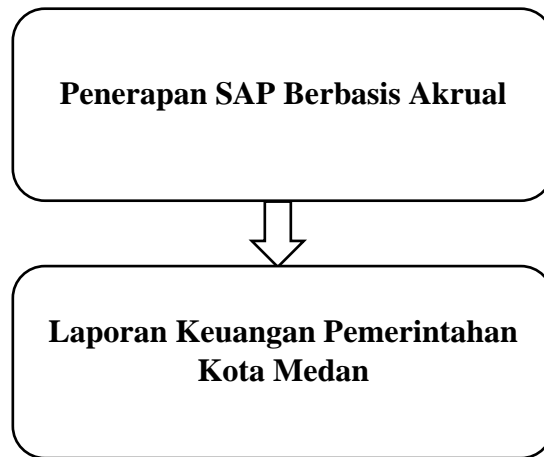
Keuangan daerah Perlu dikelola secara tertib dan sistematis, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku, dan dengan penerapan Prinsip Akuntansi Publik (SAP), sehingga dapat mencapai efektivitas, efisiensi, ekonomi. Keuangan daerah merupakan objek di akuntansi pemerintah dimana dalam akuntansi sektor publik data dengan data yang digunakan untuk memberikan informasi pertanggungjawaban, transparansi, transaksi ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan pemerintahan dan organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba.

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari bidang akuntansi, untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, handal atau dapat dipercaya dan tepat waktu, serta menciptakan adanya

pemerintahan yang bersih, berwibawa. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang memastikan konsisten dalam laporan keuangan.

Secara skematik, kerangka pemikiran dapat di lihat pada gambar berikut

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Penulis, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif adalah suatu metode yang meneliti untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian secara holistik atau bentuk hitungan lainnya. Dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis data.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Medan tepatnya pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan yang terletak di Jl. Kapten Maaulana Lubis No.2 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Februari 2023 sampai dengan selesai. Berikut ditampilkan tahapan skedul penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul proses penelitian

No	Jenis Penelitian	JADWAL PENELITIAN																				
		Feb 2023	Maret s/d Mei 2023	Juni s/d Agustus 2023	September s/d Oktober 2023	November s/d Desember 2023	Januari 2024															
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Kunjungan ke Instansi		■																			
3	Pembuatan Proposal		■	■	■																	
4	Seminar Proposal					■																
5	Riset					■	■															
6	Penyusunan Data							■	■	■	■											
7	Seminar Hasil											■										
8	Bimbingan Skripsi												■	■	■	■						
9	Sidang Meja hijau																			■	■	

Sumber : Data diolah penulis, 2023

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/Subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Menurut Sugiyono (2019) Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu akan di teliti. Dalam penentuan sampel penelitian ini di ambil dari data laporan keuangan pemerintah khususnya laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun 2022 Pemerintahan Kota Medan bagian BKAD.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan laporan realisasi anggaran tahun 2022 yang disusun oleh Pemerintahan Kota Medan.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti berupa pertanyaan dalam bentuk wawancara.

b. Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data menurut Sugiyono (2018) adalah: “Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk.

3.5 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

3.5.1 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan definisi kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional sangat penting dalam metode penelitian karena definisi operasional bertujuan untuk menyamakan pandangan peneliti dengan pembaca mengenai

variable yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2018) definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

3.5.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya maka variabel dalam penelitian ini, meliputi :

Tabel 3.2 Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Indikator
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintah merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pendapatan, beban, aset hutang, dan ekuitas diakui dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan (PP 71 tahun 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Akuntansi dan Information Tecnology(IT) based system. 2. Komitmen dari pimpinan 3. Tersedianya SDM yang kompeten. 4. Resistensi terhadap perubahan 5. Lingkungan/masyarakat. <p><i>Sumber(simanjuntak, 2010)</i></p>

Sumber: Data diolah penulis,2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati objek penelitian secara langsung

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab antara dua orang yang bersangkutan. Metode ini dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Suatu metode pengumpulan data yang ditunjukan untuk memperoleh penjeakan melalui sumber-sumber dokumentasi. Seperti dokumen laporan keuangan di kantor BPKAD di antaranya: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan (merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Dimana data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menganalisis data dengan cara menggunakan kalimat sebagai dasar teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data.

Langka-langka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Melakukan identifikasi terhadap LKPD Kota Medan terkait penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
2. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.

3. Menganalisis kesesuaian data yang didapat dengan PP No. 71 Tahun 2010:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Laporan Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO)
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Medan merupakan ibu kota dari Sumatera Utara. Kota Medan ini menjadi kota terbesar di Sumatera Utara. Sejarah Medan berasal dari sebuah kampung yang didirikan oleh guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590 selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karasidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting diluar Pulau Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Kemudian tahun 1909, Medan menjadi penting diluar Jawa, terutama setelah Pemerintahan kolonial dengan membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, 2 orang bumi putra Melayu dan 1 orang Tionghoa

Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan

kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing, dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru, dan ulama. Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal semenjak tahun 1950, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha pada tahun 1974. Dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, Kota Medan bertambah luas hampir 18 kali lipat (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan)

1. Letak Geografis Kota Medan

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35'–98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5–37,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 265,00 km² dan jumlah penduduk sekitar 2.478.145 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 9.352 jiwa/km². Batas wilayah administrasi Kota Medan relatif kecil dibandingkan dengan kota-kota lain, namun posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangatlah penting karena terletak di wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumber daya yang relatif besar dan beragam.

2. Visi Misi Dan Logo Pemerintahan Kota Medan

Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif

Misi

1. Medan berkah “Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.”
2. Medan maju “Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.”
3. Medan bersih “Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.”
4. Medan kondusif “Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
5. Medan inovatif “Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.”
6. Medan beridentitas “Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air”.

Logo Pemerintahan Kota Medan

Adapun Logo Pemerintahan Kota Medan Sebagai Berikut:

Gambar 4.1 Logo Pemerintahan Kota Medan



Makna Logo Kota Medan Sebagai Berikut:

1. 17 biji padi artinya tanggal 17 dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 bunga kapas artinya bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 dari perisai artinya tahun 45 dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing artinya Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
5. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang artinya bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.
6. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bahagian perisai berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

4.1.2 SKPD/OPD Pemerintahan Kota Medan

Berikut SKPD/OPD di Pemerintahan Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebersihan Kota Medan
2. Dinas Kesehatan Kota Medan
3. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan
4. Dinas Pertamanan
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan
6. Dinas Tata Ruang dan Bngunan Kota Medan
7. Dinas Pencegah Pamadaman Kebakaran Kota Medan
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan
9. Dinas Pendidikan Kota Medan
10. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan
11. Dinas Perhubungan Kota Medan
12. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Medan
13. Dinas Pendapatan Daerah Kkota Medan
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
15. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Medan
16. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
18. Sekretariat Daerah Kota Medan
19. Sekretariat DPRD Kota Medan
20. Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan
22. Inspektorat Kota Medan

23. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Medan
24. Badan Pemerdayaan Masyarakat Kota Medan
25. Badan Pemerdayaan Perempuan Dan KB Kota Medan
26. Kecamatan Medan Marelan
27. Kecamatan Medan Deli
28. Kecamatan Medan Timur
29. Kecamatan Medan Selayang
30. Kecamatan Medan Tuntungan
31. Kecamatan Medan Perjuangan
32. Kecamatan Medan Johor
33. Kecamatan Medan Baru
34. Kecamatan Medan Petisah
35. Kecamatan Medan Labuhan
36. Kecamatan Medan Maimun
37. Kecamatan Medan Belawan

4.1.3 Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010

Kehadiran peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah Standar Akuntansi

Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Selanjutnya untuk menjawab Apakah dalam mengerjakan laporan keuangan sudah sepenuhnya berdasarkan kebijakan SAP Berbasis Akrual?. Hal tersebut telah di paparkan oleh Bapak Dedy Syaputra selaku staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan :

“Ya, sudah sepenuhnya Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,transparan,partisipasif,dan akuntabel BKAD kota medan menetapkan SAP berbasis akrual sejak TA 2015,dikarenakan tuntutan peraturan perundang undangan”.

Dari hasil pemaparan Narasumber di atas serta dokumen laporan keuangan Pemerintah Kota Medan yang di dapatkan oleh peneliti, basis akuntansi yang digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PSAP 01 paragraph 14.

Berdasarkan hasil wawancara tentang bagaimana tahap pencatatan laporan keuangan oleh entitas akuntansi berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang dipaparkan oleh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan:

“Tahap pencatatannya dengan cara dimigrasi semua pencatatan dari cash basis dipindahkan ke SIMDA biru”.

Suatu perubahan pastinya menimbulkan pro kontra terkhusus bagi aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Aparatur harus terlebih dahulu paham serta

beradaptasi agar selanjutnya dapat menjalankan SAP tersebut secara optimal. Hal ini merupakan tugas besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara cermat dengan persiapan yang matang dan terstruktur mengingat akuntansi berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding akuntansi berbasis kas maupun basis kas menuju akrual. Terdapat tambahan laporan keuangan yang semula empat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menjadi tujuh Laporan Keuangan dengan tambahan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.1.4 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 01 Pemerintah Kota Medan

1. Laporan keuangan pemerintah Kota Medan

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

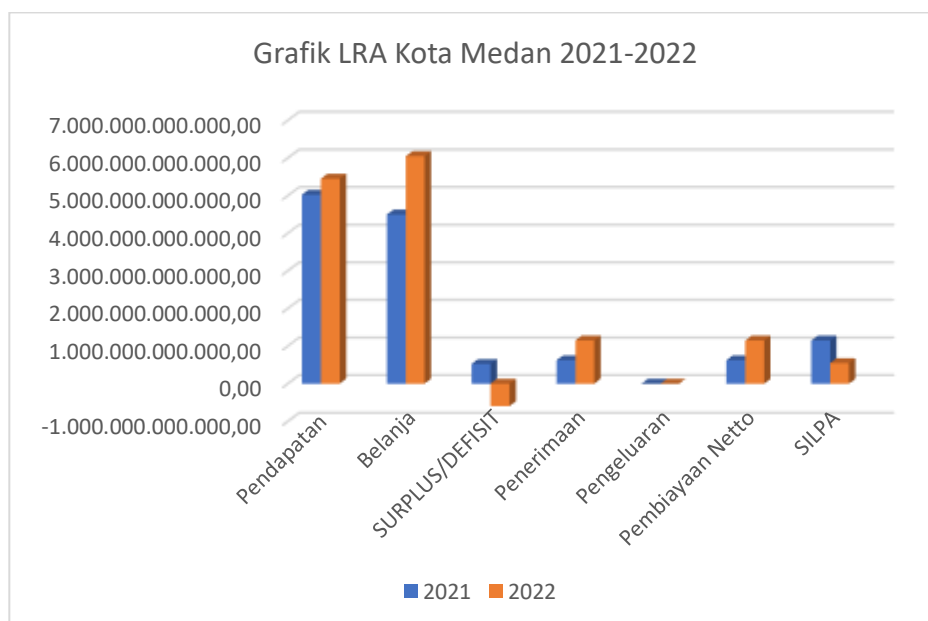
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran paling kurang mencakup Pendapatan-LRA, Belanja, Surplus/defisit-LRA, Penerimaan pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan, Pembiayaan neto, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) dan Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Kota Medan

Uraian	2021	2022
Pendapatan	5.023.080.346.608,29	5.449.340.586.722,85
Belanja	4.499.145.144.311,87	6.047.219.172.842,00
SURPLUS/DEFISIT	523.935.202.296,42	(597.878.586.119,15)
Penerimaan	622.661.218.417,83	1.146.423.416.682,23
Pengeluaran	-	-
Pembiayaan Netto	622.661.218.417,83	1.146.423.416.682,23
SILPA	1.146.596.420.714,25	548.544.830.563,08

Sumber : BKAD Kota Medan

Gambar 4.2 Grafik Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Medan tahun 2021-2022



Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan grafik laporan realisasi anggaran pada Pemerintahan Kota Medan tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 kecuali pada SURPLUS/DEFISIT mengalami penurunan ditahun 2022 diakibatkan karena Transfer dari pemerintah pusat di kurangi.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Medan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih Kota Medan

Uraian	2021	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	622.430.887.156,83	1.146.596.420.714,25
Saldo Anggaran Lebih Akhir	1.146.596.420.714,25	548.544.830.563,08

Sumber : BKAD Kota Medan

Gambar 4.3 Grafik Lpsal Pemerintahan Kota Medan tahun 2021-2022



Sumber : Data diolah penulis, 2023

c. Neraca

Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Takalar menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode

sebelumnya pos-pos berikut: Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya, Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, piutang dari kegiatan, persediaan, Investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas.

Tabel 4.3 Neraca Pemerintahan Kota Medan 2021-2022

Uraian	2021	2022
Total Aset	34.575.279.681.182,40	34.890.098.200.281,26
Total Kewajiban	119.015.428.567,94	136.660.001.544,84
Ekuitas	34.456.264.252.614,50	34.753.438.198.736,42

Sumber :BKAD Kota Medan

Gambar 4.4 Neraca Pemerintahan Kota Medan 2021-2022



Sumber : Data diolah penulis, 2023

Jumlah aset mengalami kenaikan di tahun 2022 di karenakan adanya pembelian, pengadaan, hibah dari pemerintah daerah, dan kewajiban di tahun 2022 mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2021 ini menunjukkan pekerjaan di tahun 2022 sudah terbayarkan terlihat dari kenaikan Kewajiban yang terjadi ditahun 2022 yang menunjukkan adanya kenaikan kewajiban.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, Kegiatan nonoperasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO.

Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintahan Kota Medan

Uraian	2021	2022
Pendapatan	5.024.566.404.587,36	5.455.055.087.614,11
Beban	4.634.478.989.911,02	5.196.063.669.193,85
Surplus/Defisit dari Operasi	390.087.414.676,34	258.991.418.420,26
Surplus Defisit dari kegiatan non Operasional	-	-
Surplus/Defisit LO	388.287.782.788,34	258.833.745.681,26

Sumber : BKAD Kota Medan

Gambar 4.5 Laporan Operasional Kota Medan 2021-2022



Sumber data diolah penulis 2023

Pendapatan di tahun 2022 mengalami kenaikan di bandingkan di tahun 2021 ini di akibatkan karena pendapatan di tahun 2022 dari rencana perjanjian-perjanjian dari pihak hotel.

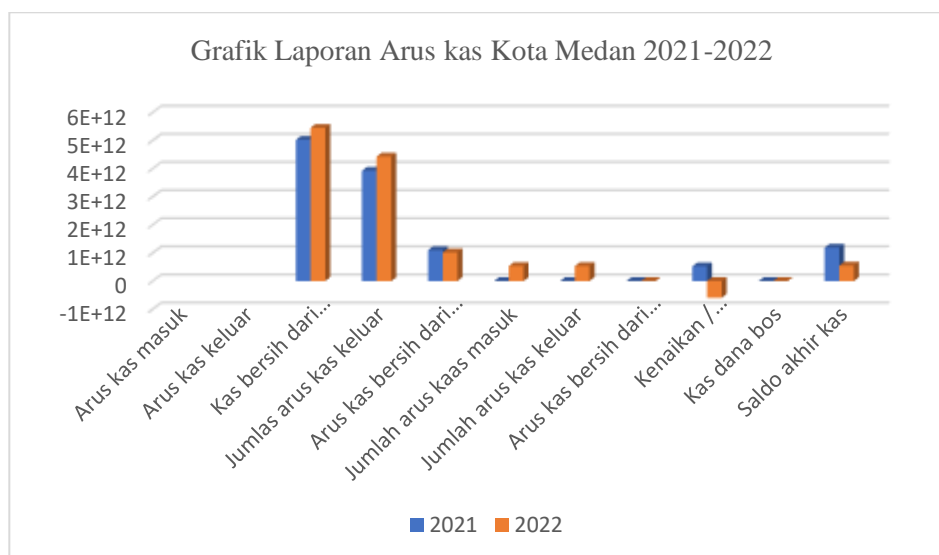
e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan . Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintahan Kota Medan

Uraian	2021	2022
Arus kas masuk	5.023.080.346.608,29	5.449.340.586.722,85
Arus kas keluar	3.924.540.527.172,87	4.429.683.360.190,00
Kas bersih dari Aktivitas Operasi	1.098.539.819.435,42	1.019.657.226.532,85
Jumlah Arus kas keluar	574.604.617.139,00	1.617.535.812.652,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	574.604.617.139,00	1.617.535.812.652,00
Jumlah arus kas masuk	0,00	533.984.244.344,83
Jumlah arus kas keluar	(230.331.261,00)	534.157.248.376,85
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	230.331.261,00	(173.004.032,02)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	524.165.533.557,42	(598.051.590.151,17)
Kas dana bos	439.029.183,02	99.716.469,00
Saldo akhir kas	1.185.064.732.055,58	548.728.638.137,08

Sumber :BKAD Kota Medan

Gambar 4.6 Laporan Arus Kas Kota Medan 2021-2022

Sumber: Data diolah penulis, 2023

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas pemerintahan kota medan menggambarkan kenaikan dan penurunan ekuitas serta penyebab kenaikan dan penurunan ekuitas.

Tabel 4.6 Laporan perubahan ekuitas Pemerintahan Kota Medan

Uraian	2021	2022
Ekuitas awal	33.785.239.483.406,50	34.456.264.252.614,50
Ekuitas akhir	34.456.264.252.614,50	34.753.438.198.736,42

Sumber: BKAD Kota Medan

Gambar 4.7 Laporan Perubahan Ekuitas Kota Medan 2021-2022



Sumber: Data diolah penulis, 2023

4.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut PP No.71 Tahun 2010

PSAP	Pemerintah Kota Medan	Sesuai	Tidak Sesuai
PSAP No.01 Penyajian Laporan Keuangan tanggungjawab penyusunan dan menyaji laporan keuangan pada pimpinan entitas komponen-komponen laporan keuangan,laporan realisasi anggaran,laporan perubahan saldo angrgan lebih,neraca,laporan operasional,laporan arus kas,laporan perubahan ekuitas,catatan ataslaporan keuangan.	Laporan keuangan Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai PSAP No. 01 yang mempunyai yaitu 7 komponen laporan keuangannya terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan keuangan (merupakan bagian yang tidak terpisah dari ke enam laporan keuangan).	√	
PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran,belanja,transfer,surplus/defisit,dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya	Dari PSAP No. 02 yang membahas tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai berdasarkan hasil laporan keuangan yang di dapat di Pemerintahan Kota Medan yang menyajikan mengenai Realisasi Anggaran-LRA, belanja,transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan.	√	

<p>PSAP No.03 Laporan Arus Kas.Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelapor.disajikan untuk mempertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan</p>	<p>Dengan PSAP No. 03 yang membahas tentang Laporan Arus Kas pada Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP No. 03 dimana tujuan dari Laporan Arus Kas yaitu untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas sesuai laporan keuangan Pemerintahan Kota Medan.</p>	√	
<p>PSAP No.04 Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan dan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,LO,LAK,dan laporan perubahan ekuitas</p>	<p>Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP No. 04 yang membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan meskipun dalam laporan keuangan. Pemerintaham Kota Medan tidak terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan akan tetapi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan merupakan bagian yang tidak terpisah dari ke enam (6) laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi, Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.</p>	√	
<p>PSAP No.05 Akuntansi persediaan Pada Persediaan diakui pada saat potensi ekonomi dipemerintah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,pada saat diterima hak kepemilikannya atau kepengusaannya berpindah.</p>	<p>Akuntansi Persediaan Pemerintah Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP No. 05 yang membahas tentang Akuntansi Persediaan di mana koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 227.863.975.262,42 ditahun 2022.</p>	√	
<p>PSAP NO.06 Akuntansi investasi Klasifikasi Investasi yaitu: a.investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. b.Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya penanaman investasinya</p>	<p>Akuntansi Investasi pada Pemerintah Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP No. 06 yang membahas tentang Akuntansi Invetasi dengan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan, di mana dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Medan dalam investasi jangka panjang yang di bagi menurut sifatnya yaitu yang termasuk investasi yaitu dana bergulir sedangkan investasi</p>	√	

yaitu permanen dan non permanen	permanen yaitu penyertaan modal pemerintah daerah sesuai pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.		
PSAP No.07 Akuntansi aset tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas	Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Pemerintahan Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP 07 yang membahas tentang Akuntansi Aset Tetap yang di klasifikasikan menurut sifatnya sesuai isi atas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.	√	
PSAP No.08 Akuntansi konstruksi dan pengerjaan Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus di akui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika : a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaita dengan aset tersebut yang akan di peroleh b.biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. c.aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.	Dalam PSAP No. 08 yang membahas tentang Akuntansi Konstruksi dan Pengerjaan sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan di lihat dari segi Proyek pembangunan revitalisasi Lapangan Merdeka dari tahun meliputi pembangunan alun-alun dan fasilitas pendukung, serta basemen. Selain situs sejarah, revitalisasi Lapangan Merdeka juga ditujukan untuk ruang terbuka hijau. Di dalam rencana pembangunan yang tertera di maket, nantinya akan dibangun panggung rakyat, serta fasilitas penunjang. Seluruhnya menerapkan konsep pelestarian ruang kota bersejarah dengan rancangan yang kontemporer. Di maket tersebut tampak pula tempat pemberdayaan UMKM. Penataan kawasan Kota Lama Medan pun menjadi bagian revitalisasi tersebut. Pembangunan revitalisasi Lapangan Merdeka yang dari tahun 2022 sampai sekarang terus diadakan pengerjaan agar lebih meningkatkan keindahan supaya nantinya pengunjung semakin nyaman dan aman dan pendapatan Pemerintahan Kota Medan semakin meningkat dari tahun ketahun.	√	
PSAP No.09 Akuntansi kewajiban Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban an	Dalam PSAP No. 09 yang membahas tentang akuntansi kewajiban di mana PSAP No. 09 sudah sesuai dengan laporan	√	

<p>jangka pendek jika di harapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pe laporan</p>	<p>keuangan Pemerintahan Kota Medan, yang terbagi dalam utang jangka panjang dan utang jangka pendek, utang jangka panjang termasuk utang dalam negeri-obligasi dan utang jangka pendek termasuk utang bunga, utang belanja, pendapatan di terima di muka.</p>		
<p>PSAP No.10 Korelasi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang Berubah. contoh,perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut</p>	<p>Dalam PSAP No. 10 yang membahas tentang Korelasi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa sudah sesuai Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan dimana Jumlah aset mengalami kenaikan di tahun 2022 di karenakan adanya pembelian, pengadaan, hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, begitu pula kewajiban di tahun 2022 mengalami kenaikan di bandingkan di tahun 2021 ini menunjukkan pekerjaan di tahun 2021 masih banyak yang tidak di bayarkan di bandingkan di tahun 2022 yang menunjukkan adanya penurunan kewajiban.</p>	√	
<p>PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidas Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	<p>Dalam PSAP No. 11 yang membahas tentang Laporan Keuangan Konsolidasi sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan meskipun Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan lainnya</p>	√	
<p>PSAP No.12 Laporan operasional Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan</p>	<p>Dalam PSAP No. 12 yang membahas tentang Laporan Operasional sudah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan yang menyajikan berbagai unsur</p>	√	

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun.	pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasi serta pos luar biasa		
---	---	--	--

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan perbandingan dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan 12 pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berarti laporan keuangan Pemerintah Kota Medan sudah bisa di katakan berkualitas.

4.1.6 Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010

Perlunya upaya dan kerja sama dari berbagai pihak yang membuat keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

a. Sistem Akuntansi dan IT

Adapun Perangkat pendukung yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Badan Keuangan Aset Daerah Kota Medan sebagaimana dipaparkan oleh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan :

“Aplikasi keuangan (SIMDA), Komputer,Kecepatan jaringan Kesiapan aplikasi, perangkat, SDM”.

Sehubungan dengan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan Kota Medan Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang ditetapkan pada tahun anggaran 2015, apakah ada masalah yang dihadapi?. Yang dipaparkan oleh bapak Dedy Syahputra:

“ Masalah yang dihadapi adalah SIMDA yang digunakan sebelum berbasis akrual adalah SIMDA cas basis setelah adanya akrual, jadi BKAD kota medan harus menyiapkan SIMDA aplikasi keuangan yang akrual yaitu SIMDA biru dan SIMDA hijau dan Perpindahan dari cas basis ke akrual SKPD harus di cek kembali”.

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi Pemerintah Kota Medan karena mereka dapat berkomunikasi dengan BPKB untuk mengurangi permasalahan terkait pengguna SIMDA baru sehingga SDM di Pemerintahan Kota Medan dapat dengan mudah memahami perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual. Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang digunakan Pemerintahan Kota Medan berguna untuk mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya good governance. Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang digunakan BKAD Kota Medan dalam pengelolaan data keuangannya:



Sumber: bpkp.go.id

b. Komitmen dari Pimpinan

Seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dan keyakinan kuat terhadap suatu perubahan yang akan membawa organisasinya kearah yang lebih baik, secara otomatis individu yang berada didalam organisasi tersebut akan merasa optimis dan yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Apalagi perubahan itu dipercaya dapat menunjang kinerja dan kemajuan organisasi dimana mereka bekerja, maka telah sepatutnya komitmen kuat dan rasa optimis tersebut dimiliki oleh setiap pemimpin. Ditambah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.

Dengan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual dapatkah mempengaruhi komitmen, sumber daya dan perangkat pendukung berikut ini pemaparan dari staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Medan:

“Tidak mempengaruhi komitmen, akuntansi berbasis cast dan akuntansi berbasis akrual yang membedakan hanya sitem pencatatannya. jadi kalau sudah diamatkan di undang-undang harus dilaksanakan komitmennya harus mengikuti undang-undang atau perda yang telah ditetapkan. Untuk SDM nya yang jadi masalah karena pertama cast bassis tiba-tiba berbasis akrual secara otomatis kita harus belajar tentang basis akrual. Untuk perangkat pendukung hanya sistem pencatanya saja yang berbeda kalau untuk perangkat pendukung tetap menggunakan aplikasi yang sama hanya saja ada sistem yang baru didalam penggunaan aplikasinya”.

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Medan:

“Kita disini komitmen untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual ini, kalau dukungan dari atasan kita sering melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembelajaran kesana, jadi kita sering melakukan pengiriman beberapa staf atau pejabat khususnya dibidang akuntansi untuk pembelajaran kesana”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa komitmen yang dilakukan oleh pemimpin sangat berpengaruh secara efektif dan efisien sehingga dapat terlaksananya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual secara penuh.

c. SDM yang kompeten

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten merupakan faktor penting bagi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, sebab SDM yang bekerja danturun langsung menjalankannya. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. Untuk itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk menerapkan basis akrual, diperlukan pemahaman khusus mengingat SAP ini tergolong baru di pemerintahan. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan keberhasilan implementasi basis akrual ini.

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual SDM yang Kompeten dapat berpengaruh terhadap terlaksananya penerapan SAP berikut pemaparan dari staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Medan:

“Kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko Medan saya katakana nilainya 8 dari 10, sudah cukup baik lah tingkat pemahaman SDM disini. Terakhir tahun sebelum pemberlakuan penyusunan laporan keuangan di Pemko Medan kita sudah melakukan BIMTEK ya untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKPD itu disini dinamakan untuk Kasubag Keuangan atau Penatausaha Keuangannya, kita buat Kasub Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sudah kita lakukan pelatihan sih,

cuman berapa tahun ini kita tidak melakukan BIMTEK ya, hanya kita sifatnya melakukan pendampingan bukan BIMTEK atau Diklat. Karena setiap SKPD melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman SDM sangat berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual terutama dibagian keuangan (akuntansi) dan perbendaharaan penerimaan dan pengeluaran di Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik dan dengan hal itu penerapan basis akrual dapat terlaksana dengan baik dikarenakan Pemerintah Kota Medan telah melakukan pelatihan kepada SDM dengan cara pendampingan untuk meningkatkan pemahaman SDM dalam menyusun laporan keuangan.

d. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan yang baru, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi. Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual perlunya kebijakan-kebijakan akuntansi diterapkan agar tercapainya hal tersebut, Pemerintahan Kota Medan telah menggunakan peraturan yang mengatur penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual Terakhir diubah Perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan perubahan kedua atas Perwali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014.

Sehubungan dengan itu Pemerintahan Kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan PP No 71 tentang standar akuntansi pemerintah Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, sebagaimana perubahan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan No 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan.

e. Lingkungan/Masyarakat

Masyarakat adalah poin utama untuk mendukung keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintah dengan adanya dukungan yang positif dari masyarakat membuat Pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakannya.

Dalam menerapkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah apakah lingkungan/masyarakat sangat berpengaruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Medan:

“Sangat berpengaruh dengan adanya standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual maka dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan Pemerintahan Kota Medan dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dari dorongan positif masyarakat dan bukan hanya itu masyarakat dapat membantu Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4.1.7 Pembahasan

Proses akuntansi keuangan daerah pada umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan dan tahap pelaporan. Begitu pula dengan laporan

keuangan yang dihasilkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan (BKAD) sudah berdasarkan laporan keuangan yang berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas berubah menjadi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan salah satu pegawai yaitu Bapak Dedy Syaputra selaku staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jabatan Kasubid Akuntansi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan, Ketika di tanya peraturan pemerintahan yang di pakai pada saat ini, Bapak mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintahan yang di pakai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang secara penuh mulai di terapkan pemerintahan Daerah Kota Medan pada tahun 2015.

Aparatur pengelola keuangan pemerintahan Kota Medan ketika ditanyakan mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah tahu akan definisi dari basis akrual itu sendiri, suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan. Kemudian PP 71 Tahun 2010 sudah jelas begitu di rencanakan sudah di catat sebagai perencanaan pada saat perencanaan sudah diakui. Kemudian di tanya kembali kelebihan dari PP Nomor 71 Tahun 2010, bapak menjawab kelebihan dari PP 71 Tahun 2010 sudah di jelaskan berapa yang mau di terima sesuai dengan ikatan kontraknya, di bandingkan dengan PP 24 Tahun 2005 di mana tidak jelas rencana yang mau di terima. Ketika di tanya kembali pengaruh PP 71 Tahun 2010 terhadap kualitas Laporan keuangan mereka menjawab bahwa setelah PP 71 Tahun 2010 lebih transparan dan

berkualitas yang menghasilkan 7 (Tujuh) komponen laporan keuangan dari entitas pelaporan

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Dan 5 (lima) kompoonen laporan keuangan dari entitas akuntansi.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)

Setelah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa dalam mengerjakan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sudah sepenuhnya diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Kemudian pada tahap pencatatan laporan keuangan oleh entitas akuntansi berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan cara dimigrasi semua pencatatan dari cas basis dipindahkn ke SIMDA biru.

Jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak, setelah diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan namun, bagi para pengelola keuangan pemerintahan Kota Medan kompleksitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh PP 71 Tahun 2010 semakin nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan). Pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut dengan *extra countable* atau pencatatan terpisah antara akuntansi dengan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yunita Kurnia Shanti (2018) Hasil penelitian menunjukkan penerapan basis akrual pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP 71 tahun 2010. Untuk pengungkapan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas belum dijelaskan secara memadai dalam CALK. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual (SIMRAL) bahwa penyusunan laporan keuangan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi, serta dapat memberikan informasi realisasi anggaran dan dipantau secara langsung oleh manajemen guna membantu pengambilan keputusan.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku untuk tercapainya good governance.

Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintahan Kota Medan yang sudah di terapkan sejak tahun 2015 telah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010. Ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

hal dapat dilihat dari indikator (Simanjuntak, 2010) yaitu: Sistem Akuntansi dan IT, komitmen dari pemimpin, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatasi dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan.

Ada alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan karena masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami dan belum tersedianya fasilitas yang memadai di seluruh daerah, meskipun aturan ini telah berlaku selama 7 tahun sejak tahun 2015, oleh sebab itu pemerintah daerah dan satuan perangkat daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah.

Di sisi lain ada beberapa peneliti yang meneliti di daerah tertentu di Nusantara yang dilakukan oleh Maria Suryaningsih, Maruf Hidayat (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil Penelitian Dikatakan berpengaruh karena standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL yang diukur oleh beberapa indikator memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL dikatakan baik karena sebagian besar standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL telah diterapkan dan dijalankan sesuai fungsi dan standar operasionalnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Evelyn Novianti (2016) bahwa laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul

belum sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual baik sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya dan penelitian yang dilakukan dan E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 , ini jelas artinya banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratasi dengan baik sehingga penerapan PP No. 71 Tahun 2010 yang diharapkan sesuai sejak tahun 2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan belum dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Berbeda dengan peneliti (2023)

Berbeda dengan peneliti (2019) yang menyatakan bahwa hasil penelitian baik dari segi laporan keuangan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan untuk kendala seperti sistem akuntansi dan IT, resistensi terhadap perubahan, serta lingkungan/masyarakat telah diatasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Medan khususnya di bagian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikan peran pemerintah dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari 7 (Tujuh) komponen laporan keuangan yaitu:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan Operasional (LO)
 - 5) Laporan Arus Kas
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7) Catatan atas Laporan keuangan.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tantangan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual komitmen dari pimpinan, SDM yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan

lingkungan/masyarakat dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Medan serta tidak terciptanya kendala-kendala yang rumit seperti sistem akuntansi yang dapat mudah dipahami oleh para SDM di Pemko Medan, serta adanya pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Medan seperti melakukan pendampingan agar meningkatkan efektifitas kinerja SDM dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya cara untuk memenuhi kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidang akuntansi pemerintahan dengan cara menyusun perencanaan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi dan mengikut sertakan SDM di bidang akuntansi dalam seminar atau pelatihan dengan cara diklat atau Bimtek tentang SAP Berbasis AkruaI khususnya di Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, R. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(3), 381-392.
- Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Keuangan Daerah Di Kabupaten Lembata.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016).Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov.Sulut. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1392-1399*
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Cetakan Pertama. Purwekerto: CV IRDH.*
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19-35.
- Halim, I. (2021). *Analisis laporan keuangan.*
- Holle, V. A., Salle, A., & Sanggenafa, M. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 16-35.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In

- Jati, B. P. (2019). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Lia Aulia (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP No.71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Medan.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32
- Mahmudi. (2017). *Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (Doctoral dissertation, Tesis UNIKOM).
- Maria Suryaningsi (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Profiet (vol 3 no 1)*
- Maruf Hidayat (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke). *Jurnal AKRAB JUARA Volume 5 Nomor 3 Edisi Agustus 2020 (175-185)*.
- Novianti, Evelyn (2016) Evaluasi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : studi kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Skripsi thesis, Sanata DHarma University.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty

Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ramadhan, P. R. (2019, September). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. In *Seminar Nasional Taman Siswa Bima* (Vol. 1, No. 1, pp. 147-153).
- Ramdani, E., & Agustina, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 5(1), 1-10.
- RI No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemeritah.
- Roring, H. S. 2019. Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 7, No. 4.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43-54.

- Simanjuntak, B. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Di Sektor Pemerintahan Indonesia Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Simanjuntak, B. H. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
- Skripsi Calon Wisudawan S-1, Prodi Pendidikan Ekonomi, FKIP Undana, Periode Desember 2021
- Suprihatin, N. S., & Ananthi, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242-252.
- Suryaningsih, M., & Hidayat, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satker-Satker Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke). *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(3), 175-185.
- Ulum, A. S. (2018). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1).
- Umar Sako Felmi D Lantowa (2018) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo *Vol 2 No 1 (2018): January*
- Wibowo, P. (2019). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis Akruwal dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 7(3), 80-93.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Yusnita Kurnia Shanti (2018) Analisis Penerapan Basis Akruwal atas SAP 71 Tahun 2010 dan Mengetahui Dampak yang terjadi pada Penyajian Laporan Keuangan pada SKPD Kecamatan ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1, Januari 2018*.